

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA MEDAN ESTATE  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ADITYA WARDANA  
19850204**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/23

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA MEDAN ESTATE  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**OLEH  
ADITYA WARDANA  
19850204**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/23

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Perhut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Nama : ADITYA WARDANA  
NIM : 19850204

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I. POL



Dr. Etisaq Juliana Hasibuan, MSi

Dekan

Mengetahui



Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I. POL

Ka. Prodi

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Wardana

NPM : 198520204

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Juni 1999

Alamat : Jl. Gambir psr 8 Tembung, Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang."** adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan daftar pustaka yang dilampirkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan.

Medan, 2023



ADITYA WARDANA  
198520204

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini:

Nama : ADITYA WARDANA

Npm : 19850204

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan  
Pada tanggal: Juli 2023  
Yang menyatakan



ADITYA WARDANA



## ABSTRAK

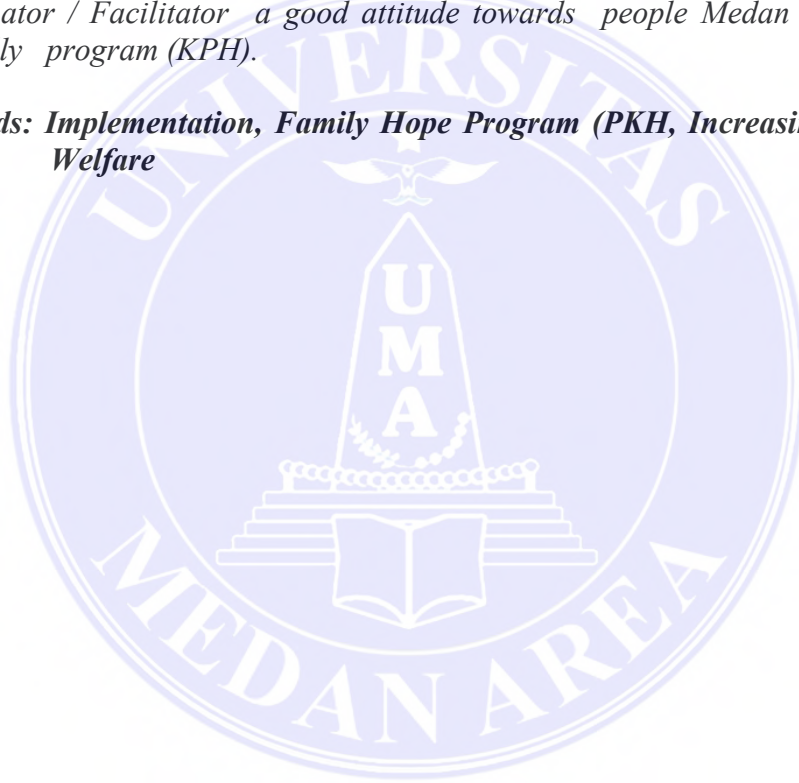
Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut: Untuk menganalisa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Untuk menganalisa faktor apa yang menghambat dan pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Kebijakan segi komunikasi yang dijalankan oleh pihak Kepala Desa Medan Estate telah memberikan informasi bawahannya pada koordinator pendamping desa mereka bekerja sesuai dengan kebijakan Menteri Sosial dan Peraturan Menteri Sosial No 10/HUK/2013 tentang Mekanisme Pengguna Data Terpadu Program Penanganan Program Keluarga Sejahtera. Kebijakan bagi Koordinator Pendamping Desa sebagai pelaksana telah terlaksana dengan baik sesuai dengan arahan dari kepala Desa Medan Estate dalam kebijakan menjalankan program PKH. Kebijakan segi disposisi yang dilaksanakan oleh Koordinator/Pendamping Desa Medan Estate telah menunjukkan sikap yang baik terhadap masyarakat Desa Medan Estate khususnya bagi yang mendapatkan program PKH. Kebijakan segi struktur birokrasi para Koordinator Pendamping Desa telah mengerti dan mengetahui mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Medan Estate.

**Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

## **ABSTRACT**

*Objectives study follows: To analyze the implementation of the Family Hope Program in improving community welfare, to analyze what factors hinder and support implementation Family Program in improving community Medan Estate Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Research qualitative research methods. Results study indicate communication policy carried Medan Estate Village information village assistant coordinator work accordance Minister Social Affairs policy and Minister Social Affairs Regulation No. 10 / HUK / 2013 concerning Integrated Mechanisms Family Welfare Programs. Policy Village Facilitator Coordinator implementer carried in accordance direction Medan Estate Village head in policy running program. Policy carried Medan Estate Village Coordinator / Facilitator a good attitude towards people Medan Estate Village, especially program (KPH).*

**Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH, Increasing Community Welfare**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Aditya Wardana  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Gambir psr 8 Tembung, Sumatera Utara.  
Email : wardanaaditya303@gmail.com

### 2. Nama Orangtua

Nama Ayah : Suyanto  
Nama Ibu : Agustina Wati  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Jl. Gambir psr 8 Tembung, Sumatera Utara.

### 3. Pendidikan

2007-2013 : SD Negeri 1017405 Tembung  
2013-2016 : Mts Nurul Fathimiyah  
2016-2019 : SMK Swasta Teladan Medan  
2019-2023 : Universitas Medan Area



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Program Studi Adminitrasi Publik untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan, seperti keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan sebagainya. Namun, dengan kemauan keras dan dorongan cita-cita serta tanggungjawab yang dilandasi dengan itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupeten Deli Serdang”**.

Telah banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MSc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu **Khairunnisa Lubis, S.Sos. M.I. POL**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu **Dr. Budi Hartono, M.Si.**, selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam proses pengerjaan penelitian ini.
5. Ibu **Khairunnisa Lubis, S.Sos. M.I. POL**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta seluruh staf administrasi Universitas Medan Area.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Medan, Juli 2023

Penulis

ADITYA WARDANA

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> ..	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Implementasi.....	9
2.1.1. Indikator Implementasi .....	10
2.1.2. Implementasi Publik.....	14
2.1.3. Keefektifan Implementasi .....	16
2.2. Program Keluarga Harapan.....	18
2.3. Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.4. Penelitian Terdahulu.....	21
2.5. Kerangka Berpikir.....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3. Sumber Data.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5. Instrumen Penelitian.....	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	34
3.7. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	36

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum.....	39
4.1.1. Gambaran Umum Desa Medan Estate.....	39
4.1.2. Visi dan Misi.....	40
4.1.3. Struktur Organisasi.....	42
4.2. Hasil Penelitian.....	53
4.2.1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kanupaten Deli Serdang.....	53
a....Komunikasi.....	53
b....Sumber Daya Manusia.....	57
c....Disposisi.....	60
d....Struktur Birokrasi.....	63
4.2.2. Faktor Menghambat Dan Pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupeten Deli Serdang Faktor Penghambat.....	68
a....Faktor Hambatan.....	68
b....Faktor Pendukung.....	69
4.3. Pembahasan.....	70

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Sumber Data.....	73
5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir.....	26
---------------------------	----





## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penerima PKH Kabupaten Deli Serdang.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	21
3. Waktu Penelitian.....	29
4. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara Penelitian.....	75
Lampiran II Dokumentasi Penelitian.....	76
Lampiran III Panduan Wawancara.....	80



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki masalah sosial dan ekonomi. Demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya masalah di bidang sosial ekonomi khususnya masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial untuk meminimalisir permasalahan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa Negara yang dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program subsidi bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). PKH lebih di maksud sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin bukan membuat malas masyarakat miskin tapi untuk membuat masyarakat lebih produktif yang nanti nya tidak bergantung pada bantuan pemerintah lagi.

Saat ini pemerintah memiliki tujuan yang baik yaitu berupaya agar masyarakat miskin yang memiliki kesulitan akses pada berbagai bidang kehidupan. PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. Meskipun sebagai program perlindungan social dari pemerintah, PKH disebut

memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan conditional cash transfer, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan dan tidak bergantung terus pada pemerintah bila sudah keluar dari PKH. PKH selama ini ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat, PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dana bantuan ini di harapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dampaknya konsumsi langsung, dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi sehingga dapat di harapkan memutus rantai kemiskinan antar generasi dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya sehingga keluar dari kategori RTSM.

Proses dari PKH tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu melainkan lebih kekeluarganya. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, Hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung bergerak pada bidang

pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut karena masih harus di bantu proram lain nya. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal

Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Berdasarkan bantuan berkaitan dengan kesehatan berlaku bagi RTSM dengan dibawah 6 tahun dan/ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.

Fenomena yang muncul pada penelitian ini adalah dimana para penerima PKH. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli



Serdang untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Medan Estate. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya yang terdapat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Koordinator PKH tidak dapat menambahkan peserta PKH yang data nya tidak ada di BPS sehingga tidak semua RTSM menjadi anggota PKH. Koordinator yang sulit dikeranakan lemahnya sosialisasi dan komunikasi diantara aktor local sebagai penunjang program yang berperan dalam kelancaran kegiatan PKH Sosialisasi yang lemah di tingkat penerima manfaat dan lingkungannya ditambah kurang pengetahuan pendamping akan teknik meyakinkan sasaran program berdampak pada kondisi yang kurang menguntungkan di sisi pendamping secara khusus dan program secara umum.

Selanjutnya, permasalahan yang muncul adalah pihak Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kurang berkompeten dalam pembagian program PKH, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan dengan warganya sehingga lebih mengutamakan pihak keluarganya sementara program tersebut masih ada yang sangat membutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembagian program PKH belum bisa dikatakan merata khususnya

bagi warga miskin yang seharusnya mereka yang berhak untuk mendapatkan program tersebut.

Tabel 1.1.

**Jumlah Penerima PKH dan Jumlah Nominal Desa Medan Estate  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga	Jumlah Nominal diterima/bulan
1	Tahun 2019	365	3.182	Rp. 800.000
2	Tahun 2020	378	3.285	
3	Tahun 2020	381	3.985	

Sumber : Kantor Kepala Desa Medan Estate, 2020

Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langka koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, untuk perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin 1 dan rentan diperlukan program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Demi mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan, perlu menetapkan program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Ketentuan umum Program Keluarga Harapan adalah merupakan program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam

data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat Data dan Informasi Kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.

Oleh karena itu berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupeten Deli Serdang”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian program PKH yang belum merata
2. Selaku bagian koordinasi pendataan tidak relevan dalam pendataan program PKH.
3. Pembagian program PKH masih memiliki sifat kekerabatan keluarga sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan program tersebut tidak kebagian.

### 1.3. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penelitian, maka perumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor apa yang menghambat dan pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menganalisa faktor apa yang menghambat dan pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2. Secara manfaat

Untuk memberi dukungan kepada Kepala Desa tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupeten Deli Serdang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. 3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan).

### 2.1.1. Indikator Implementasi

Menurut Leo Agustino (2019) Adapun indikator implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan George C. Edward III bahwa Implementasi kebijakan adalah salah satu proses dari kebijakan publik, tahapan implementasi adalah suatu bagian yang sangat penting, karena sebaik apapun tahapan atau proses yang telah dibuat dan direncanakan tak akan berarti jika tidak diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling menentukan dalam proses implementasi kebijakan publik, yang dimaksud bersifat menentukan karena bagaimanapun bentuk suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan disusun secara matang dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan secara baik. Maka dari itu implementasi kebijakan publik dalam suatu prosesnya tidak dapat dilaksanakan sebelum diterbitkannya undang-undang ataupun peraturandan juga anggaran yang harus disediakan untuk pembiayaan implementasi kebijakan publik tersebut. Model

kebijakan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward ini berperspektif *top-down*.

Menurut George C. Edward ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, melalui empat faktor ini kemudian akan dapat diidentifikasi hambatan dalam mencapai keberhasilan dari suatu proses pelaksanaan kebijakan.

#### 1) Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Apabila para implementor kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan kerjakan itu berarti pertanda bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik maka dari pada itu setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang akan dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

#### 2) Sumber Daya

Variable selanjutnya yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sumber daya. Perintah-perintah suatu kebijakan mungkin sudah dikomunikasikan secara tepat, akurat dan konsisten, akan tetapi jika pelaksana dari implementasi kebijakan

kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumberdaya merupakan sesuatu variable yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi staf yang memiliki kemampuan yang kompeten dan keterampilan dalam bidang-bidangnya dan dalam hal keuangan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah adalah sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilan-keterampilan pengelolaan. Sering kali mereka mempunyai latar belakang professional dinaikkan pangkatnya sampai mereka menjadi administrator-administrator, dan dengan demikian, tidak lagi menggunakan keterampilan-keterampilan professional mereka. Keterbatasan keterampilan-keterampilan pengelola merupakan masalah besar yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan bahkan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang dapat digunakan untuk pelatihan professional.

### 3) Disposisi

Selanjutnya variabel ke 3 menurut Edward III yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor yang sangat penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

#### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien. Sebenarnya para pelaksana dari suatu kebijakan mungkin telah mengetahui tentang apa yang akan dilakukan dan mempunyai keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktu-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan suatu kebijakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan dan Membuat *Standart Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi



yang kompeten dan kapabel. Diperlukan fragmentasi ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.

### **2.1.2. Implementasi Publik**

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:657), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahannya. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu. Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan, “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Sedangkan menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses

tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”.

Selanjutnya menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Mulyadi (2015:26) menyatakan, “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Kemudian menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”. Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (topdown) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up)”. Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”. Matland (Hamdi, 2014:98) mengemukakan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut: 1. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).

- 1) Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
- 2) Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
- 3) Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

### 2.1.3. Keefektifan Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2019:156) implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, ataupun jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Ada beberapa keefektifan kebijakan sebagai berikut:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.  
Ketika relasi ini berjalan dengan baik, maka logikanya seluruh warga akan saling hormat menghormati dan memberikan respon pada otoritas dan memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah, mematuhi aturan hukum dan sebagainya.
- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan.  
Hal ini tidaklah mudah karena bermain diranah kesadaran publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah mindset warga
- c. Ada atau tidaknya sanksi hukum.

Orang akan menjalankan dan melaksanakan suatu kebijakan karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijatuhkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan dan sanksi lainnya.

d. Kepentingan pribadi atau kelompok.

Subjek kebijakan sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

e. Bertentangan dengan system nilai yang ada.

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada disuatu daerah.

f. Waktu.

Efektif atau tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Tetapi dengan berjalannya waktu suatu kebijakan yang awalnya ditolak dianggap controversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

g. Sosialisasi.

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan formulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

h. Koordinasi antar lembaga.

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stakeholders. Oleh karena itu koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan.

## 2.2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Indra Bastian (2015:6) Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negaranegara berkembang atau Dunia Ketiga bekas jajahan harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang banyak dan bernilai tinggi. Karenanya penjajah melakukan penjajahan di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya alamnya.

Konsep tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebagai pengendali negara, dan nilai kehidupan manusia telah berkurang sejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah dirubah menjadi kancah kepentingan anggaran dan penguasa. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan social, persamaan, demokrasi, kepentingan masyarakat, dan keadilan ditempatkan pada posisi yang terendah. Pemerintah Indonesia sejatinya telah merencanakan cukup banyak program. Semenjak orde reformasi dimulai,



telah terjadi beberapa kali pergiliran pemerintahan mencakup Presiden, Wakil Presiden, juga DPR/MPR. Masing-masing pemerintahan pun memiliki program-program positif masing-masing.

Program tersebut berusaha menopang kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan. Salah satu program yang digalakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial ini fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Dwi Heru Sukoco (2016) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

### 2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan yakni membuat menyelamatkan dan memakmurkan. Sedangkan istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakah. Dalam bahas Arab sendiri masyarakat disebut dengan mujtama' yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al'Arab mengandung arti pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan. Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling bekerjasama. Jadi dari kata musyarakah dan mujtama' sudah dapat ditarik pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Berarti dengan kata lain kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan

kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut (Suharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan sosial dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan sosial yaitu: a) Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang b) Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial c) Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan batin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak-hak dasar warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau

## 2.4. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagaiteori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Tabel 2.1.

## Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Siswati Saragi. 2021. ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK.	Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.
2	Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty. 2017. PROGRAM KELUARGA HARAPAN MERUPAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERSIFAT MEMBERIKAN BANTUAN PADA RTSM	Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.



3	Yusuf Murah. 2016. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI INVESTASI SOSIAL.	Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	Hasil penelitian bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals). Dari sudut pandang kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan sosial terbaru di Indonesia apabila merujuk pada definisi kebijakan sosial maka PKH merupakan salah satu bentuk program pelayanan sosial yang merupakan tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan sosial yang memberikan pelayanan sosial oleh pemerintah berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin dengan ketentuan mempunyai anak balita, anak sekolah dan ibu hamil dan keluarga dengan harapan di masa depan mereka akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan, dan ini merupakan bentuk investasi sosial untuk mengurangi kemiskinan. Apabila dilihat dari perspektif pembangunan Program Keluarga Harapan berupaya untuk memberi sumber daya kepada orang yang kurang berbakat atau yang mempunyai kemampuan yang kurang lebih setara dengan anggota masyarakat lain.
4	Kartika Ayu. 2020. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN	Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah dan rantai penyebabnya harus diputus. Penanggulangan kemiskinan masih berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung

	<p>AJUNG KABUPATEN JEMBER.</p>		<p>pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir PKH yaitu meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan dilaksanakannya PKH diharapkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat semakin meningkat khususnya pada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PKH, menemukan faktor pendukung dan penghambat serta upaya penanggulangannya di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengalami banyak kendala dan belum terlaksana dengan baik.</p>
<p>5</p>	<p>Alexsander Yandra. 2020. EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RUMBAI, KOTA PEKANBARU.</p>	<p>Metodologi penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pemilihan informan purposive dan data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dan dianalisis secara etik dan emik dengan pendekatan teori evaluasi William Dunn</p>	<p>Temuan penelitian ini adalah PKH di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sudah dilakukan dan jumlah bantuan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masyarakat Kelurahan Sri Meranti masih menganggap bantuan belum merata karena masih ada keluarga miskin yang tidak menerima dana bantuan PKH.</p>

## 2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka dasar pemikiran merupakan skema pemikiran teoritis peneliti yang merangkai konsep-konsep yang saling berhubungan yang dipilih oleh peneliti.

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik diperlukan tiga pilar penilaian agar implementasi dapat berjalan dengan baik, yaitu:

### 1) Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III meliputi : transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

### 2) Sumber Daya .

Staf yang memiliki kemampuan yang kompeten dan keterampilan dalam bidang-bidangnya. Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Kebijakan , Sumber Daya Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Keuangan.

### 3) Disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor yang sangat penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif.

### 4) Struktur Birokrasi

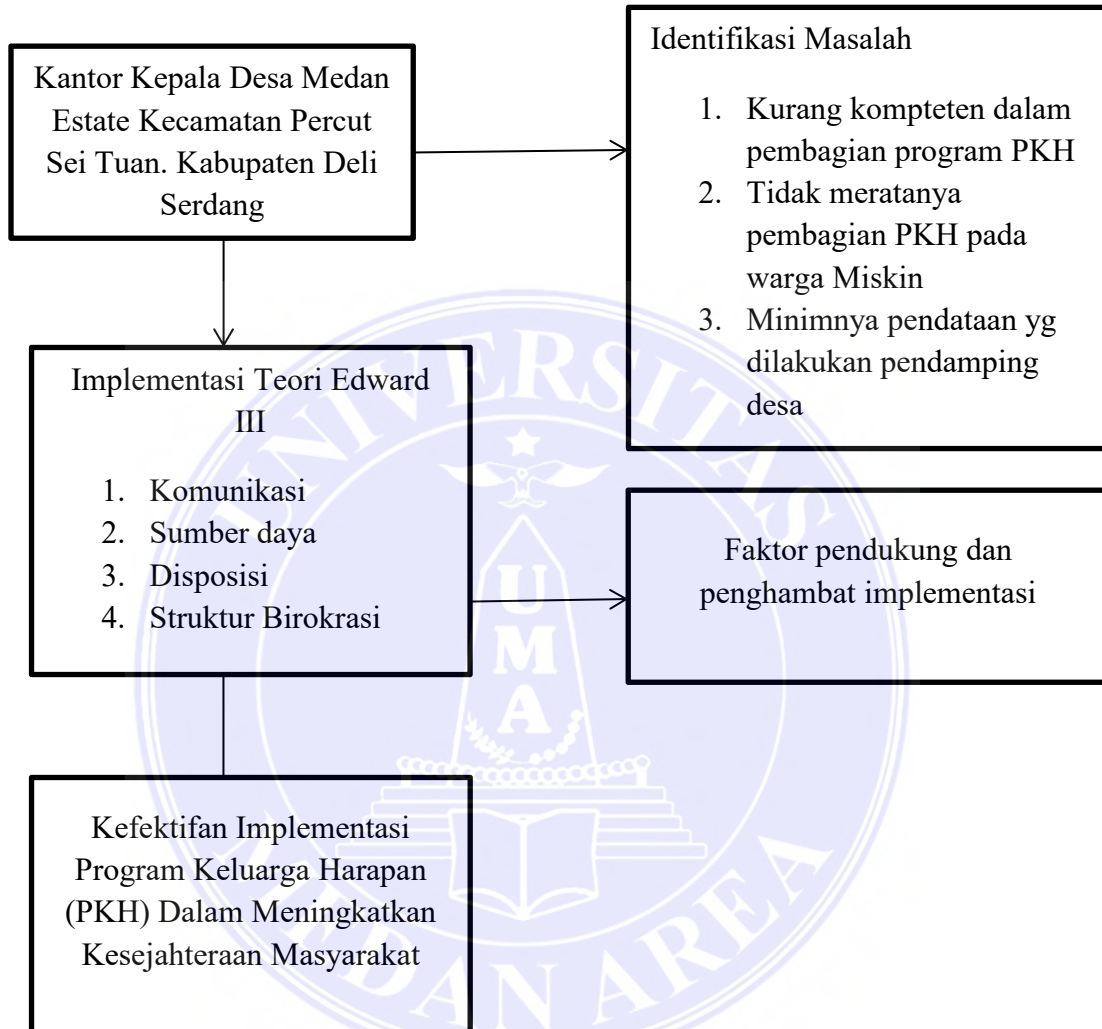
Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang dimulai dari:

a. SOP (*Standart Operating Procedures*)

b. Fragmentasi

**Gambar 2.1.**

**Kerangka berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Moleung (2019:4) Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis serta memiliki tujuan tertentu yang praktis maupun teoritis. Dalam penulisan tesis ini penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian secara alamiah dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti melakukan penelitian pengamatan secara langsung atau observasi dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam serta dokumentasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdaang, Sumatera Utara 20371.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan mulai bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.



**Tabel 3.1.**  
**Jadwal Penelitian**

No	Uraian	Waktu Penelitian 2022-2023																				
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pembuatan Proposal	■																				
2	Bimbingan Proposal		■																			
3	Pengajuan Seminar Proposal			■	■	■	■															
4	Seminar Proposal							■	■													
5	Bimbingan skripsi									■	■	■	■	■	■							
6	Seminar Hasil Skripsi																■	■	■			
7	Sidang Skripsi																			■	■	■

### 3.3 Sumber Data

Menurut Moleung (2019:12) Sumber data merupakan bagian yang sangat terpenting bagi peneliti. Sebuah data tidak akan dapat diperoleh tanpa sumber data terlebih dahulu. Adapun jenis sumber data, sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau sumber sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat terlebih dahulu melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan oleh studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, situs-situs, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi narasumber (*informan*), tempat atau lokasi mana yang kita pilih sebagai sumber data.

#### 1. Informan Penelitian

Menurut Moleung (2019:29) Peneliti mendapatkan sumber data dari beberapa narasumber yaitu Melalui beberapa informan tersebut peneliti mendapatkan informasi yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun narasumber yang dipilih berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu. Berikut kategori informan penelitian:

- a. Informan kunci merupakan orang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok, yaitu Kepala Desa Medan Estate.
- b. Informan utama merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, yaitu Sekretaris Desa Medan Estate.
- c. Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, yaitu salah satu masyarakat Desa Medan Estate

#### **Tabel 3.2.**

### Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1 orang	Informan Kunci
2	Sekretaris Desa	1 orang	Informan Utama
3	Koordinator/Pendamping Desa	1 orang	Informan Utama
4	Masyarakat dan staf	2 orang	Informan Tambahan
<b>Jumlah Total</b>		<b>5 orang</b>	

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Guba dan Lincoln (1981:228), Adapun teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam penelitian kualitatif. Observasi mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, dan rekaman gambar. Perlunya pengamatan yaitu agar peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipannya. Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu materi wawancara terbatas. Wawancara tidak terstruktur yaitu materi wawancara bebas.

Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam secara tidak terstruktur dengan subjek penelitian, karena peneliti ingin memperoleh realitas senyatanya, oleh karena itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan yang tertulis, foto, rekaman, video yang dapat digunakan peneliti sebagai bukti pendukung penelitian. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung serta menambah bukti penelitian. Selain melalui observasi dan wawancara,

informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, rekaman dan lain sebagainya.

Dalam dokumentasi ini peneliti melakukan dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara dalam penulisan skripsi ini. Peneliti melengkapi data dengan berupa catatan harian, rekaman dan foto yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Menurut Ade Heryana, S. M. (2018:23). Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan kualitas data yang mendukung peneliti ketika melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti juga dibantu beberapa instrumen penelitian, yaitu pedoman wawancara, alat tulis dan buku catatan harian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Patton (1986:268), Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data telah selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis terlebih dahulu. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.



1. Reduksi Data Dalam reduksi data ini peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian ataupun pemfokuskan, penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data yang berlangsung di lapangan. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data ini dilakukan dengan membuat catatan ringkas mengenai isi dari catatan data yang diperoleh selama di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan *coding*, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan serta menuliskan catatan peneliti (*memo*).

2. Sajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakannya. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, yang dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis serta sistematis, sehingga mudah untuk dipahami. Sajian data harus ditata dengan baik dan rapi, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori ataupun kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap suatu hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan hanya salah satu dari kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji terlebih dahulu kebenarannya dan kesesuaiannya terlebih dahulu sehingga validitasnya bisa terjamin.

### **3.7. Definisi Konsep dan Definisi Operasional**

#### **3.7.1. Definisi Konsep**

Menurut Sugiyono (2020:212) Berapa jumlah kelompok konsep yang perlu dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung apa yang diteliti. Konsep yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok konsep, yaitu kelompok konsep yang berkenaan dengan variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak konsep yang dikemukakan. Adapun konsep penelitiannya yaitu:

1. Implementasi adalah salah satu proses dari kebijakan publik, tahapan implementasi adalah suatu bagian yang sangat penting, karena sebaik apapun tahapan atau proses yang telah dibuat dan direncanakan tak akan berarti jika tidak diimplementasikan dengan baik.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program

keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik..

3. Kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### **3.7.2. Definisi Operasional**

Terdapat dua objek dalam penelitian yaitu implementasi suatu kebijakan dan standar pelayanan sebagai berikut:

#### 5) Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, meliputi : transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

6) Sumber Daya .

Dengan demikian sumberdaya merupakan sesuatu variable yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi staf yang memiliki kemampuan yang kompeten dan keterampilan dalam bidang-bidangnya.

- b. Sumber Daya Manusia
- c. Sumber Daya Kebijakan
- d. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- e. Sumber Daya Keuangan

7) Disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor yang sangat penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

8) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil Penelitian menunjukkan Kebijakan segi komunikasi yang dijalankan oleh pihak Kepala Desa Medan Estate telah memberikan informasi pada bawahannya terkhusus pada koordinator pendamping desa bahwa mereka bekerja sesuai dengan kebijakan Menteri Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial No 10/HUK/2013 tentang Mekanisme Pengguna Data Terpadu Program Penanganan Program Keluarga Sejahtera.. Kebijakan segi sumber daya manusia bagi Koordinator Pendamping Desa sebagai pelaksana telah terlaksana dengan baik sesuai dengan arahan dari kepala Desa Medan Estate dalam kebijakan menjalankan program PKH. Kebijakan segi disposisi yang dilaksanakan oleh Koordinator/Pendamping Desa Medan Estate telah menunjukkan sikap yang baik terhadap masyarakat Desa Medan Estate khususnya bagi yang mendapatkan program PKH. Kebijakan segi struktur birokrasi para Koordinator Pendamping Desa telah mengerti dan mengetahui mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dsa Medan Estate.



2. Faktor menghambat dan pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu bahwa perlu adanya pengawasan langsung dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang agar kendala yang dihadapi oleh Koordinator Pendamping Desa PKH di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat diminimalisir. Selain itu, untuk memudahkan monitoring perlu dilaksanakan evaluasi kinerja Koordinator Pendamping Desa dan penambahan anggota pendamping sehingga dalam penyaluran bantuan PKH bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

## 5.2. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja koordinator pendamping desa, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisiten.
2. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemsikinan di masyarakat sesuai tujuan program PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ade Heryana, S. M. (2018). Nforman Dan Pemilihan Informan Dalam. Penelitian kualitatif. Universitas Esa Unggul. Jakarta
- Agustino, Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2006. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta. Batinggi.
- Achmad Mubarak, 2016. sikologi Keluarga,(Malang:Madani. Penerbi Andi. Jakarta
- Charles O. Jones.1996. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An. Introduction to The Study of Public Policy..
- Hamdi, Muchlis (2014) Kebijakan Public: Proses, Analisis Dan Partisipasi. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Indra Bastian.(2015) Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.Penerbit : Erlangga:Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/sejahtera> (diakses pada tanggal 30 November 2019)
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Pubik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Sugiyono. 2020 , Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&d, Bandung,

### Internet:

<https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Mengenal Program PKH. Sumber wacana: Dwi Heru Sukoco diakses tanggal 13 November 2022.

<https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomipembangunan/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan> diakses tanggal 13 November 2022.

## JURNAL

1. SISWATI SARAGI. 2021. ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOTA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK.
2. SYAHPUTRA ADISANJAYA SULEMAN, RISNA RESNAWATY. 2017. PROGRAM KELUARGA HARAPAN MERUPAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERSIFAT MEMBERIKAN BANTUAN PADA RTSM DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.
3. YUSUF MURAH. 2016. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI INVESTASI SOSIAL.
4. KARTIKA AYU. 2020. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER.
5. ALEXSANDER YANDRA. 2020. EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RUMBAL, KOTA PEKANBARU.

## LAMPIRAN I

### WAWANCARA PENELITIAN

#### IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPETEN DELI SERDANG

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah disebutkan di atas, maka dengan hormat, saya :

Nama : ADITYA WARDANA

NIM : 198520204

Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan wawancara (daftar pertanyaan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata satu (S1), Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Karenanya, kebenaran dan kelengkapan jawaban yang anda berikan akan sangat membantu bagi penulis, untuk selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan.

Atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab daftar pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

ADITYA WARDANA

## LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN

### Dokumentasi 1



Wawancara bersama informan kunci selaku Kepala Desa Medan Estate, Pada Tanggal 04 Juli 2023. Pukul 09.00 Wib. Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang pelaksanaan program PKH merupakan sebuah sistem yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan juga tolok ukur kinerja sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran program yang diharapkan di dalam pelaksanaannya. Penerapan pelaksanaan program PKH pada koordinator pendamping desa yang dimulai dengan adanya perumusan serta penyusunan struktur organisasi pada pihak Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan adanya program yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.



## Dokumentasi 2



Wawancara bersama informan utama selaku Sekretaris Desa Medan Estate, dengan Bapak Faizal Arifin, SH Pada Tanggal 04 Juli 2023. Pukul 09.00 Wib. Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang pelaksanaan program PKH merupakan sebuah sistem yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan juga tolok ukur kinerja sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran program yang diharapkan di dalam pelaksanaannya. Penerapan pelaksanaan program PKH pada koordinator pendamping desa yang dimulai dengan adanya perumusan serta penyusunan struktur organisasi pada pihak Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan adanya program yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.

### Dokumentasi III



Wawancara bersama informan utama selaku Koordinator/Pendamping Desa Medan Estate. Pada Tanggal 04 Juli 2023. Pukul 09.00 Wib. Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang pelaksanaan program PKH merupakan sebuah sistem yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan juga tolok ukur kinerja sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran program yang diharapkan di dalam pelaksanaannya. Penerapan pelaksanaan program PKH pada koordinator pendamping desa yang dimulai dengan adanya perumusan serta penyusunan struktur organisasi pada pihak Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan adanya program yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.

#### Dokumentasi IV



Wawancara bersama informan tambahan selaku warga Desa Medan Estate. Pada Tanggal 04 Juli 2023. Pukul 09.00 Wib. Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang pelaksanaan program PKH merupakan sebuah sistem yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan juga tolok ukur kinerja sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran program yang diharapkan di dalam pelaksanaannya. Penerapan pelaksanaan program PKH pada koordinator pendamping desa yang dimulai dengan adanya perumusan serta penyusunan struktur organisasi pada pihak Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan adanya program yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.



